

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Ahmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zamal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- H Moh Koesnoe, 2002, *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta.
- Imam Sudiyat., 1978, *Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Jhon Salondeho, 1998, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan kedua: Sinar Grafika, Jakarta.
- Ragawino, Bewa, 2008, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Raja Grafindo, Depok.
- Samosir Djamanat, 2013, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Cetakan I Nuansa Aulia, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman H, dan Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Ter Haar dan Otie Saiman Soemaddiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat*, PT Alumni Bandung, Bandung.
- Vollenhoven, C. Van, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat DiIndonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat*, Raja Wali Pres, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## **C. Jurnal-Jurnal**

I Wayan Suwanda, 2013, "Eksistensi Tanah Adat Druwe dalam Perspektif Sistem Hukum Pertanahan Nasional", Jurnal IUS, Vol I, Nomor 1, April 2013.

Widhiana H. Puri, 2017, "*Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia*", Bhumi Vol. 3, No. 1, Mei 2017.

## **D. Internet**

<https://brwa.or.id/news/read/267> diakses pada tanggal 4 Desember 2020, Jam 12.51.

<https://bakumsu.or.id/in/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir/> diakses pada tanggal 4 desember 2020, pada pukul 13.51.

[http://eprints.undip.ac.id/15941/1/Wa\\_hyu\\_Wardhana.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15941/1/Wa_hyu_Wardhana.pdf), diakses pada 28

Juni 2020, pukul 12:10

